

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG OLEH SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**Kiagus Muhammad Ragil Septian
NIM 07011381621134**

Konsentrasi Keuangan Publik

**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

**"EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN KENDARAAN DINAS
OPERNASIONAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG OLEH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMABANG TAHUN 2018"**

Oleh :

KIAGUS MUHAMMAD RAGIL SEPTIAN

NIM.07011381621134

Pembimbing I

1. *Dra. MARTINA, M.SI.*

NIP.196603051993022001

Tanda Tangan



Tanggal

*Jum'at / 6
2022*

Pembimbing II

2. *ERMANOVIDA, S.SOS., M.SI.*

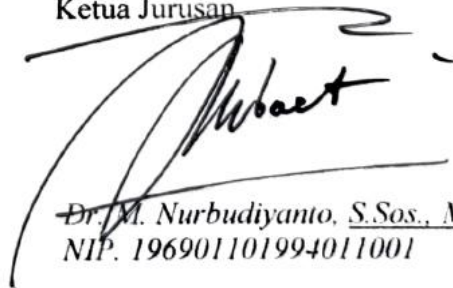
NIP.196911191998032001



*Jum'at / 6
2022*

Mengetahui,

Ketua Jurusan



*Dr. M. Nurbudiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196901101994011001*

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG OLEH
SEKRETSRIAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018”**

Skripsi

Oleh :

Kiagus Muhammad Ragil Septian
NIM.07011381621134

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 02 Januari 2022**

Pembimbing :

1. Dra. Martina, M.Si.

NIP.196603051993022001

2. Ermanovida, S.Sos.,M.Si.

NIP.196911191998032001

Tanda Tangan



Penguji :

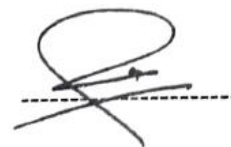
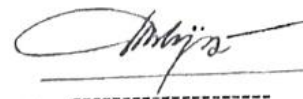
1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.

NIP.196511171990031004

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.

NIP.197705122003121003

Tanda Tangan



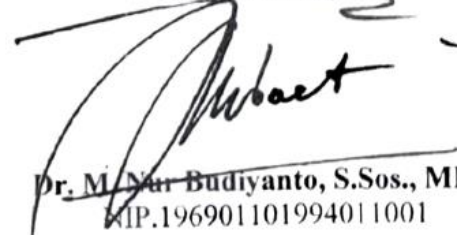
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP.196901101994011001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiagus Muhammad Ragil Septian
NIM : 07011381621134
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Palembang Oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2018

Dengan ini saya menyatakan

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana / Ahli Madya, baik yang ada di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini yang di buat adalah serangkaian gagasan, rumusan dan penelitian yang telah saya buat sendiri, tanpa bantuan pihak lain terkecuali arahan tim pembimbing dan penguji.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 3 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan



Kiagus Muhammad Ragil Septian
NIM. 07011381621134

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim)”

Kupersembahkan Untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku, Retno
Krisdwi Astuti dan Kiagus
Muhammad**
- 2. Saudara – Saudaraku Tercinta,
Kiagus Muhammad Maulana,
S.Kom dan Dana Saputri, S.E.**
- 3. Sahabat dan Teman – temanku**
- 4. Almamaterku**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kendaraan Operasional Pemerintah Kota Palembang oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang tahun 2018. Untuk mengetahui permasalahan tersebut menggunakan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dilihat dari aspek perencanaan sudah berjalan dengan efektif, kemudian dilihat dari aspek pelaksanaan pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas sudah berjalan efektif akan tetapi tidak efisien sedangkan dilihat dari aspek pengawasan pelaksanaan pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas sudah berjalan efektif. Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran kendaraan operasional tersebut diharapkan lebih memperhatikan aspek pemeliharaan sehingga pengelolaan anggaran tersebut lebih efisien

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Anggaran, Kendaraan Operasional

Pembimbing I



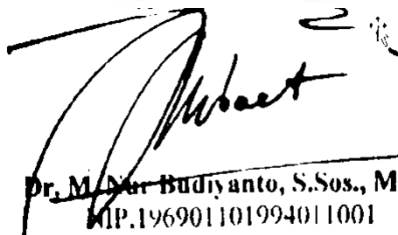
Dra. Martina, M.Si

Pembimbing II



Ermanovida, S.sos., M.Si

**Palembang, 2 June 2022
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
IP.196901101994011001**

ABSTRACT

This study aims to determine the Effectiveness of the Palembang City Government's Operational Vehicle Budget Management by the Regional Secretary of Palembang City in 2018. To find out these problems use aspects of planning, implementation, and maintenance. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, while the data collection technique uses observation, documentation, and interview techniques. The results of this study indicate that from the aspect of planning it has been running effectively, then from the aspect of implementing the management of the maintenance budget for official vehicles it has been running effectively but not efficiently, while from the aspect of monitoring the implementation of budget management for the maintenance of official vehicles it has been running effectively. In order to increase the effectiveness of the operational vehicle budget management, it is hoped that more attention will be paid to the maintenance aspect so that the management of the budget is more efficient

Keywords: *Effectiveness, Management, Budget, Operational Vehicle*

Supervisor I




Dra. Martina, M.Si

Supervisor II



Ermanovida, S.sos., M.Si

Palembang, 2 June 2022
Head of the Department of Public Administration,
Faculty of Social and Political Sciences,
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP.196901101994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Kiagus Muhammad Fahruroni. dan Retno Krisdwi Astuti. yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil serta semangat, motivasi, bimbingan, kepercayaan, dan kasih sayang selama ini yang tiada henti
2. Saudara laki-laki Kiagus Muhammad Maulana, saudara Perempuan Dana Saputri, dan seluruh sanak keluarga yang tiada henti selalu mendoakan dan memberi semangat, bimbingan, dan dukungan baik secara moril maupun materil selama ini kepada saya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Azhar, S.H.,M.Sc.,LL.M. selaku Wakil Dekan I
5. Ibu Dra. Martina, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ermanovita, S.sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, yang sabar dalam memberikan solusi terbaik, memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan ibu Ermanovida, S.sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
8. Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang beserta seluruh jajarannya.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga Skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat di kemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Palembang, 2 June 2022

Penulis

Kiagus Muhammad Ragil Septian

NIM. 07011381621134

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
1. Efektifitas.....	14
2. Pengelolaan.....	13
3. Anggaran	16
4. Pengelolaan Anggaran.....	18
5. Fokus Anggaran.....	20
6. Kendaraan Dinas Operasional	24
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Definisi Konsep	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Informan Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	39
1. Arti Lambang Kota Palembang	32
2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang.....	43
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Palembang.....	47
4. Sumber Daya Aparatur	52
5. Tujuan Dari Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan	

dinas kota palembang	55
6. Tujuan Dari Pemeliharaan Kendaraan Dinas	57
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang ...	59
8. Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas.....	61
9. Proses Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat Daerah Kota Palembang	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara/Dibiayai oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2018	5
2. Tabel 1.2 Jumlah Kondisi Kendaraan dan Pegawai yang Mendapatkan Kendaraan Dinas di Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2018	5
3. Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2018	8
4. Tabel 4.1 Sumber daya Aparatur	53
5. Tabel 4.2 Kesimpulan Dimensi Perencanaan	58
6. Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018	67
7. Tabel 4.4 Tabel Kesimpulan Dimensi Pelaksanaan	68
8. Tabel 4.5 Tabel Kesimpulan Dimensi Pengawasan	71

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas Operasional Aset Sekretariat Daerah Kota Palembang 10
2. Gambar 1 : Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang 11
3. Gambar 4.1 Kantor Pemerintahan Kota Palembang 39
4. Gambar 4.2 Lambang Kota Palembang ... 42
5. Gambar 4.5 Susunan Struktur Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang. 47
6. Gambar 4.6 Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas ,... 63
7. Gambar 4.7 Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat ... 66

DAFTAR LAMPIRAN

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Seminar Usulan skripsi 1
4. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi 2
5. Lembar Revisi Seminar Proposal 1
6. Lembar Revisi Seminar Proposal 2
7. Lembar Revisi Seminar Proposal 3
8. Lembar Revisi Seminar Proposal 4
9. Surat Permohonan Izin Penelitian Di Kesbangpol Kota Palembang
10. Surat Permohonan Izin Penelitian Di Kantor Pemerintah Kota Palembang

DAFTAR ISTILAH

PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
KASUBAG	: Kepala Subbagian
BPK	: Badan Pengawasan Keuangan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran dirancang untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dalam satu periode, tetapi anggaran bukan merupakan suatu prediksi melainkan suatu proyeksi dan estimasi mengenai apa yang akan terjadi jika berbagai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Perlunya suatu anggaran didalam sebuah negara untuk dapat menjabarkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan sebagai pedoman kerja dalam satu periode selain itu juga untuk mengetahui penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam sistem negara tersebut. Anggaran dituntut dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode. Anggaran yang didapat nantinya akan dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa anggaran yang baik dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Salah satu unsur diatas yang paling dianggap penting dalam pelaksanaan anggaran adalah efektif. Hal ini merupakan salah satu wujud penerapan anggaran berbasis kinerja yang mengenal adanya perlakuan terhadap surplus dan defisit, yang artinya pelaksanaan anggaran telah dicanangkan bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, apabila target yang ditentukan tidak tercapai sesuai realitasnya melampaui maka anggaran tersebut mengalami surplus. Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi yang ditandai dengan dilakukannya penerapan pemerintahan dengan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas desentralisasi ini ditandai dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah pada semua daerah yang ada di indonesia. Berlakunya Undang-

undang ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Menurut Undang-Undang tersebut otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Sumber-sumber pendanaan tersebut telah diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Penjelasan tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja sesuai dengan kebutuhan tetapi tetap berdasarkan pada asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Dalam menjalani roda pemerintahannya, pemerintah mempunyai 23 bidang kewenangan yang harus dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya kewenangan di bidang sosial, kesehatan, kependudukan, perhubungan dan lain-lain.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tentu saja harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan untuk pelayanan publik. Berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap melalui penganggaran belanja modal pada tiap-tiap tahun anggarannya, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada akumulasi belanja modal yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun, berdampak pada meningkatnya jumlah dan nilai aset tetap pemerintah daerah. Peningkatan tersebut juga terjadi pada aset tetap kendaraan dinas. Peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah maupun pada aset, telah menyadarkan pemerintah untuk memiliki sebuah sistem pengelolaan aset yang baik. Kebutuhan ini terjawab dengan diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah yang dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Menurut Peraturan pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah tersebut pengelolaan barang daerah antara lain: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Tidak sekedar administratif semata tetapi berpikir lebih kedepan dalam menangani barang milik daerah dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan dapat menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang daerah tersebut ialah semua kekayaan baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak beserta bagian-

bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Barang Milik daerah dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun Nomor 17 Tahun 2007, antara lain :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
2. Barang yang diperoleh lainnya yang sah yaitu :
3. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
5. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
6. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Daerah yang secara fisik dan legal dimiliki pemerintah yang berkaitan dalam tugas pokok dan fungsinya mencakup barang milik daerah tetap yang jumlahnya sangat banyak klasifikasi barang milik daerah tetap tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Peralatan sebagai sarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan sangatlah penting sebagai proses penyelenggaraan kegiatan administrasi kantor pemerintahan daerah. Untuk peralatan dan mesin terdiri mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh investaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan manfaatnya lebih dari satu tahun dalam kondisi siap pakai.

Pemeliharaan adalah suatu tahap yang sangat penting dalam penggunaan barang milik daerah. Tujuan pemeliharaan antara lain :

- a) Untuk merawat sarana dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.

- b) Barang milik daerah yang dibiayai cukup tinggi melalui APBD pada setiap tahun anggaran maka untuk itu diperlukan pemeliharannya.

Dalam kewenangan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ada pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Pengelola bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang di tangan penguasaannya. Semua pejabat di daerah sering melakukan perjalanan dinas atau pengawasan program/kegiatan termasuk di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang menggunakan kendaraan untuk membangun daerahnya menjadi lebih maju dan berkembang. Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara/Dibiayai oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2018

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan (Unit)
1	Roda Empat	50
	Jumlah	50

Sumber : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang

Tabel 1.2

Jumlah Kondisi Kendaraan dan Pegawai yang Mendapatkan Kendaraan Dinas di Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2018

No	Jenis Kendaraan	Jabatan	Kondisi	Keterangan	Tahun
1	Innova Venturer	Walikota	Baik	Roda Empat	1 Tahun
2	Innova Venturer	Wakil Walikota	Baik	Roda Empat	1 Tahun
3	Innova Venturer	SEKDA	Baik	Roda Empat	2 Tahun

4	Avanza	KEPBPEM	Baik	Roda Empat	5 Tahun
5	Kijang innova	KEPBKR	Baik	Roda Empat	7 Tahun
6	Toyota Rush	KEPBHUM	Baik	Roda Empat	1 Tahun
7	Kijang innova	KEPBPRO	Baik	Roda Empat	7 Tahun
8	Avanza	KEPBAP	Baik	Roda Empat	8 Tahun
9	Avanza	KEPBPSA	Baik	Roda Empat	8 Tahun
10	Avanza	KEPBLPBJ	Baik	Roda Empat	7 Tahun
11	Kijang Innova	KEPBUMUM	Rusak Berat	Roda Empat	5 Tahun
12	Innova	KEPBAK	Baik	Roda Empat	8 Tahun
13	Rush	KEPBHUMKAM	Baik	Roda Empat	2 Tahun
14	Avanza	KEPBOTL	Baik	Roda Empat	8 Tahun
15	Terios	KASUBAG UMUM	Baik	Roda Empat	2 Tahun
16	Avanza	KASUBAG PKK	Baik	Roda Empat	5 Tahun
17	Xenia	KASUBAG HANBWIL	Baik	Roda Empat	3 Tahun
18	Apv Luxury	KASUBAG AGAMA SOSIAL	Baik	Roda Empat	9 Tahun
19	Kijang minibus	KASUBAG KESKERA	Baik	Roda Empat	5 Tahun
20	Rush	KASUBAG KEMENDIKBUD	Baik	Roda Empat	2 Tahun
21	Avanza	KASUBAG HUBM	Baik	Roda Empat	6 Tahun
22	Kijang innova	KASUBAG DOKPER	Baik	Roda Empat	4 Tahun
23	Toyota hilux	KASUBAG DAINFO	Baik	Roda Empat	7 Tahun
24	Xenia	KASUBAG TUP	Baik	Roda Empat	4 Tahun
25	Avanza	KASUBAG PERDINPIM	Baik	Roda Empat	6 Tahun

26	Apv	KASUBAG PA	Baik	Roda Empat	8 Tahun
27	Rush	KASUBAG PERKOMINFO	Baik	Roda Empat	2 Tahun
28	Terios	KASUBAG TKPPKUKM	Baik	Roda Empat	4 Tahun
29	Xenia	KASUBAG LHKPKPP	Baik	Roda Empat	2 Tahun
30	Avanza	KASUBAG PMPD	Baik	Roda Empat	5 Tahun
31	Kijang innova	KASUBAG PPBJ	Baik	Roda Empat	7 Tahun
32	Kijang innova	KASUBAG PBJ	Baik	Roda Empat	8 Tahun
33	Innova	KASUBAG INSBJ	Baik	Roda empat	6 Tahun
34	Avanza	KASUBAG TU	Baik	Roda empat	8 Tahun
35	Xenia	KASUBAG PERLENGKAPAN	Baik	Roda empat	7 Tahun
36	Xenia	KASUBAG RT	Baik	Roda empat	6 Tahun
37	Avanza	KASUBAG TUSA	Baik	Roda empat	8 Tahun
38	Terios	KASUBAG ANGGARAN	Baik	Roda empat	3 Tahun
39	Rush	KASUBAG AKUNPELAPOR	Baik	Roda empat	4 Tahun
40	Hilux	KASUBAG BENDVERFIKASI	Baik	Roda empat	8 Tahun
41	Rush	KASUBAG PERUU	Baik	Roda empat	4 Tahun
42	Innova	KASUBAG BANTUAN HUMKAM	Baik	Roda empat	8 Tahun
43	Avanza	KASUBAG DOKINFOHUKUM	Baik	Roda empat	9 Tahun
44	Rush	KSUBAG KKAJ	Baik	Roda empat	4 Tahun
45	Terios	KASUBAGTLPP	Baik	Roda Empat	2 Tahun

46	Xenia	KASUBAGAIP	Baik	Roda Empat	7 Tahun
47	Kijang LGX	WAKASUBAG UMUM	Rusak Berat	Roda Empat	17 Tahun
48	Apv Luxury	WAKASUBAG DOKPER	Rusak berat	Roda Empat	11 Tahun
49	Mitsubhisi L300	WAKASUBAG RT	Rusak Berat	Roda Empat	18 Tahun
50	Toyata Kijang Sx	WAKASUBAG DOKINFOHU KUM	Rusak Berat	Roda Empat	18 Tahun

Sumber : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang

Pada tabel 1.1 dapat dilihat ada 50 Unit kendaraan dinas operasional sekretariat daerah kota Palembang yang dibiayai/dipelihara oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tabel 1.2 seperti tabel tersebut ada 47 unit jumlah kendaraan dinas di sekretariat daerah kota Palembang. Dan yang dibiayai hanya ada 47 kendaraan sesuai tabel 1.2 dalam tabel 1.2 ada empat kendaraan yang tidak dibiayai 48,49,50 dikarenakan rata- rata usia kendaraan diatas 10 tahun keatas, setiap kendaraan memiliki perawatan yang berbeda- beda sesuai dengan usia dan jenis kendaraan masing masing.

Tabel 1.3

Realisasi Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2018

Tahun	Target (Rp)	Relisasi (Rp)	Presentase (%)
2016	1,751,988,865.00	1,107,893,101.00	63,23%
2017	2,150,104,500.00	1,975,776,396.00	91,89%
2018	4,517,900,000.00	4,438,009,000.00	98,23%

Sumber : Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang

Tabel 1.3 ini menjelaskan anggaran yang didanai untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang berada di kesekretariat daerah kota Palembang dilihat dari realisasi anggaran tahun 2018 dengan 98,23% anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas hampir

samuanya terealisasi, walaupun adanya alokasi anggaran pemeliharaan tidak menjamin kendaraan tetap akan selalu berada pada kondisi yang bagus dan juga setiap kendaraan yang ada di lingkungan sekretariat daerah kota Palembang memiliki usia rata-rata diatas 10 tahun. Pada setiap kendaraan memiliki perawatan yang berbeda-beda sesuai dengan usia dan jenis kendaraan masing-masing. Hal tersebut menyangkut dengan masalah yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pengalokasian Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

Alasan peneliti tidak menggunakan data tahun Anggaran 2019 dan 2020 dikarenakan keterbatasan data dan anggaran yang belum selesai diaudit untuk dilaporkan ke- BPK (Badan Pengawasan Keuangan) sehingga publikasi mengenai Laporan Pertanggung Jawaban APBD (Anggaran Belanja Pendapatan Daerah) sekretariat daerah pemerintah kota Palembang belum bisa didapatkan oleh peneliti.

Fenomena yang terjadi dilapangan pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas antara lain walaupun adanya alokasi anggaran pemeliharaan tetapi masih ada kendaraan dinas yang termasuk dalam daftar aset berada dalam kondisi rusak atau tidak dapat digunakan.

Dari data yang sudah dijelaskan pada tabel 1.2 terdapat 3 kendaraan dinas yang tidak dapat digunakan karena mengalami rusak berat antara lain kendaraan dinas milik Sub Bagian Umum, Sub Bag DOKPER, Sub Bag Rumah Tangga, Sub Bag Dokumentasi Informasi Hukum dan Ham sehingga mempengaruhi presentase realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 98,23% membuat penggunaan anggaran kendaraan dinas operasional Sekretariat Daerah Kota Palembang sehingga membuat penulis berfokus pada penelitian efektifitas anggaran kendaraan dinas operasional Sekretariat Daerah Kota Palembang dikarenakan faktor – faktor ;

1. Keberadaan Fisik Aset Mobil Dinas dalam Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang

Sekretaris Daerah melakukan pengecekan kendaraan dinas dilakukan dalam rangka tertib administrasi, sehingga kesesuaian aset dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah Kota Palembang tidak hanya diatas kertas. Merupakan bagian dari korszupgah KPK untuk memastikan dan mencocokkan berkas dan fisik kendaran.

Gambar 1 : Pengecekan Fisik Kendaraan Dinas Operasional Aset Sekretariat Daerah Kota Palembang



Sumber : Dokumentasi Penulis

Fisik Kendaraan banyak yang mengalami mati pajak 2 – 3 tahun dan ada kendaraan yang belum dikembalikan oleh mantan pejabat yang sudah tidak bestatus sebagai pegawai Pemerintah Kota Palembang.

2. Pemanfaatan Penggeloan Anggaran Kendaraan Dinas dalam Menyelesaikan Berbagai Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Dalam tabel 1.2 terdapat 4 kendaraan dinas yang tidak dapat digunakan karena mengalami rusak berat sehingga anggaran pada tahun 2018 terdapat selisih 1,77% yang berfokus untuk perbaikan, perawatan dan pembaruan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Gambar 1 : Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang



Sumber : Dokumentasi Penulis

Keberadaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang terparkir dan sedang tidak digunakan oleh Aparatur Sipil Negara. Dilihat dari latar belakang diatas maka peneliti ini ingin meneliti tentang “Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kota Palembang Oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

- a. **“Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kendaraan Operasional Pemerintah Kota Palembang oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2018?”**
- b. **“Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kendaraan Operasional Pemerintah Kota Palembang oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2018?”**

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kendaraan Operasional Pemerintah Kota Palembang oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang tahun 2018.

1.4. Manfaat

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran atau masukan dan berupa sumber informasi hasil – hasil pemikiran bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pengendalian anggaran kendaraan dinas operasional pemerintah kota Palembang agar lebih baik lagi.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan terutama Ilmu Administrasi Negara khususnya konsentrasi Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad J. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Adisasmita R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bawono, R.H. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim A. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Haryatmoko. 2013. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Pamungkas. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang disempurnakan*, Surabaya : Giri Surya.
- Abdul Halim Damayanti, dan Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. YKPN.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta. PT. Rineka Cipta

Devas. Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta :UI-Press.

Beni Pekei. 2015. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Taushia.

Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Yang Mengatur
Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Semua Daerah Yang Ada Di Indonesia.

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Dala, Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara atau Daerah.

Internet :

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

(www.bpkad.sumselprov.go.id)